



## Kebijakan Tugas Pokok Guru sebagai Wujud Pembentukan Jiwa Kepemimpinan di SPS Tunas Jaya Desa Surabayan

Imam Syafi'i<sup>1\*</sup>, Sofia Tri Septiawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas PGRI Adi Buana PSDKU Kampus Lamongan, Indonesia

Alamat: Jl. Sunan Giri No. 35 Lamongan

\*Korespondensi penulis: [imamsyafiioke@email.com](mailto:imamsyafiioke@email.com)

**Abstract.** *The Policy on Teachers' Main Duties as a Means of Developing Leadership Spirit for Teachers of Early Childhood Education Units (SPS) Tunas Jaya, Surabayan Village. Data collection was conducted through interviews with the Principal and Vice Principal as a step to assess the appropriateness of policy implementation by teachers at the Early Childhood Education Unit (SPS) Tunas Jaya, Surabayan Village, Sukodadi Subdistrict, Lamongan Regency.*

**Keywords:** *Policies, Duties, Teachers.*

**Abstrak.** Kebijakan Tugas Pokok Guru Sebagai Wujud Pembentukan Jiwa Kepemimpinan Bagi Guru Satuan Paud Sejenis (SPS) Tunas Jaya Desa Surabayan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara kepada Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, sebagai langkah untuk menguji kepatutan dalam melaksanakan penerapan kebijakan oleh Guru di Satuan Paud Sejenis (SPS) Tunas Jaya Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

**Kata kunci:** Kebijakan, Tugas, Guru.

### 1. LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya zaman sekarang ini, untuk menjadi Guru harus mempunyai integritas yang tinggi, dengan tetap menjalankan Kebijakan yang berlaku, baik kebijakan dari Instansi maupun Kementerian terkait. Di samping dampak dari disiplin menjalankan Kebijakan, yakni nantinya juga timbulnya Kepemimpinan yang melekat dalam jiwa para Guru, khususnya Guru Satuan Paud Sejenis (SPS).

Guru merupakan ujung tombak dalam pembentukan karakter bagi siswa, maka dari itu, dalam pelaksanaan pembelajaran ada standar tersendiri yang harus dilaksanakan oleh Guru, mulai dari menerapkan Kebijakan-kebijakan tertentu, contohnya dalam mendesain kurikulum yang diterapkan pada saat ini, oleh Kementerian terkait di bidang Pendidikan.

Untuk mengaplikasikan kebijakan juga harus adanya pemahaman dalam menganalisis kebijakan tersebut, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Guru Satuan Paud Sejenis (SPS). Dari disiplin dalam menjalankan Kebijakan tersebut, dipastikan nantinya juga tercipta sumber daya manusia yang baik, khususnya Guru Satuan Paud Sejenis (SPS).

Sasaran dampak dari disiplin dalam menjalankan Kebijakan oleh Guru tersebut, nantinya dampaknya langsung juga kepada Murid, karena murid menuruti intruksi dari Guru,

menyebabkan murid menjadi mempunyai karakteristik baik, berhubung murid Satuan Paud Sejenis tersebut adalah anak di bawah Umur 5 tahun, jadi pasti didikan dari Guru tersebut bisa masuk dalam fikiran muridnya.

Murid akan menuruti Gurunya, kalau Guru bisa mengambil hati muridnya, dikarenakan pembelajaran untuk anak Usia Dini, yakni Satuan Paud Sejenis, merupakan anak-anak yang masih dalam pemantauan sejak dini oleh Guru. Kalau murid sudah terebut hatinya oleh guru tersebut, dipastikan dalam melaksanakan pembelajaran terjadi dampak signifikan dan positif dalam suasana pembelajaran tersebut.

Dalam pelaksanaan Pembelajaran tersebut, juga harus adanya kerjasama antar Guru seprofesi, agar tercipta kesinambungan antar Guru, untuk kepentingan dalam rangka membangun Murid menjadi taat dan patuh terhadap semua Guru, agar murid tercipta saling keterkaitan, antara Guru Satu dan Guru lainnya. Efeknya nanti bisa menjadikan Murid lebih seimbang dalam menuruti Guru lainnya

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

## **3. METODE PENELITIAN**

Analisis data dalam penelitian ini mengarah pada analisis deskriptif atau analisis yang menggambarkan informasi faktual. Untuk itu teknik analisa data menggunakan Deskriptif Kualitatif. Pendalaman dalam menggunakan deskriptif ini yakni penyajian data sesuai dengan tanggapan informan sesuai fenomena efektifitas pelaksanaan Penerapan Kebijakan Sebagai Langkah Membentuk Jiwa Kepemimpinan Bagi Guru Satuan Paud Sejenis (SPS) Tunas Jaya Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Langkah berikutnya, setelah data dikumpulkan, maka data tersebut perlu dianalisis. Menurut Miles & Humberman (1992:16) analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Jadi dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara menggunakan model interaktif atau teknik analisis induktif, yang menysasar pada data.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Saat dilakukan pembahasan mengenai hasil yang diketahui oleh peneliti, maka dari itu terkait Penerapan Kebijakan Tugas Pokok untuk Guru Satuan Paud Sejenis (SPS) Tunas Jaya di Desa Surabaya Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, adanya penerapan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Guru tersebut kurang optimal, dari segi menjalankan Kebijakan yang diinstruksikan oleh Pemerintah di bidang Pendidikan terkait maupun kebijakan dari internal lembaga sendiri.

Dari ketidak optimalan tersebut yakni dalam membuat Modul Ajar kurang tepat waktu, akan tetapi tidak semua guru yang tidak tepat waktu, hanya sebagian guru saja, karena dalam membuat bahan ajar merupakan sarana untuk pembelajaran kepada murid atau siswa. Dalam menjalankan kebijakan, khususnya dalam penerapan untuk membuat bahan ajar tersebut, yang dibatasi pada pertengahan bulan sebelum pembelajaran dimulai.

Kadang hal pembatasan untuk penyelesaian pembuatan bahan ajar biasanya sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai seharusnya sudah selesai, agar saat proses pembelajaran dimulai sudah tidak ada lagi pembuatan bahan ajar, karena proses belajar mengajar sudah dimulai. Dalam penyusunan bahan ajar tepat waktu adalah merupakan Kebijakan yang diterbitkan oleh internal sekolah, yakni Sekolah Satuan Paud Sejenis (SPS) Tunas Jaya Desa Surabaya Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Untuk menjadikan Guru tersebut bisa aktif dan tanggap dalam mematuhi kebijakan dari lembaga, terkait pembuatan bahan ajar, yaitu harus adanya motivasi dari kepala sekolah maupun dukungan dari elemen-elemen yang bersangkutan di internal sekolah. Dari motivasi maupun dukungan tersebut adalah dengan adanya kesepakatan bersama yang dalam kesepakatan tersebut harus adanya suatu daya tarik tersendiri diperuntukkan untuk guru-guru tersebut.

Dalam membuat suatu daya tarik tersendiri, itu diperlukan suatu strategi matang, dengan tetap menggunakan diskusi bersama terlebih dahulu, lalu usulan-usulan dari kepala sekolah maupun pihak terkait. Dari diskusi yang memunculkan usulan, usulan nanti di tampung dan di analisis dahulu, lalu di pilih usulan yang sekiranya bisa dijadikan sebagai usulan matang dan siap dijadikan sebagai daya Tarik untuk diterapkan kepada guru-guru.

Umumnya diperuntukkan kepada semua guru, jadi tidak untuk oknum saja, terkait kebijakan yang harus dilaksanakan oleh guru, dalam membuat bahan ajar secara tepat waktu. Ini merupakan dari elemen yang masuk dalam Peningkatan kompetensi berbasis kelompok kerja, yakni ada 4 kompetensi yang mengacu pada pada ketentuan undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional.

- 1) Pedagogik adalah suatu ilmu atau seni mendidik yang mempelajari tentang ilmu anak untuk membimbing dan mendidik anak atau ilmu dan seni mengajar supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya.
- 2) Kepribadian adalah kebiasaan sikap, sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang ketika seseorang berhubungan dengan orang lain, juga bisa dikatakan ciri yang menonjol pada diri individu
- 3) Sosial merupakan perhatian yang diberikan secara sukarela demi kepentingan umum, seperti suka membantu dan menolong sesama

Profesional adalah kemampuan seseorang yang bisa mengatasi tugasnya sesuai bidang yang ditekuni, contohnya yaitu sikap atau keterampilan dalam melaksanakan tugas dengan baik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penerapan kebijakan tugas pokok sebagai guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Sekolah Satuan Paud Sejenis (SPS) Tunas Jaya Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Dengan adanya kebijakan yang tegas mengenai tugas pokok guru, diharapkan para guru dapat menjalankan profesinya dengan lebih terstruktur, terarah, dan profesional. Tugas pokok guru, yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pengajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan melakukan pembinaan terhadap siswa, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan memaksimalkan potensi siswa.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini meliputi kurangnya sumber daya yang memadai, beban administrasi yang berlebihan, dan kurangnya pelatihan atau pengembangan profesional bagi guru. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Penerapan kebijakan tugas pokok sebagai guru juga membawa dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan motivasi guru. Ketika guru memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab mereka, hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan dalam bekerja. Namun, jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa memperhatikan konteks dan tantangan di lapangan, seperti kurangnya dukungan sosial, rendahnya kesejahteraan, atau

keterbatasan fasilitas pendidikan, maka tujuan kebijakan tersebut mungkin tidak tercapai sepenuhnya.

Di sisi lain, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, kebijakan ini memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Guru yang memahami dengan baik tugas pokoknya akan mampu menjalankan perannya dengan lebih efektif, mengembangkan kompetensinya, serta berkontribusi lebih maksimal dalam proses pembelajaran yang berkualitas.

## **Saran**

### **1) Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru**

Untuk mendukung implementasi tugas pokok, guru perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang terus-menerus. Ini akan membantu mereka dalam menguasai metode pembelajaran yang efektif dan memahami perkembangan terbaru dalam pendidikan.

### **2) Fasilitas dan Sumber Daya yang Memadai**

Pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang mendukung, seperti materi pembelajaran, teknologi pendidikan, dan ruang kelas yang kondusif. Dengan adanya sarana yang memadai, guru akan lebih mudah melaksanakan tugas pokok mereka secara optimal.

### **3) Pengurangan Beban Administrasi**

Beban administrasi yang berlebihan sering menjadi hambatan bagi guru untuk fokus pada tugas pengajaran dan pembelajaran siswa. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan memberikan ruang bagi guru untuk lebih fokus pada kualitas pengajaran.

### **4) Peningkatan Dukungan dari Pihak Sekolah dan Pemerintah**

Sekolah dan pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap penerapan kebijakan tugas pokok guru, termasuk dengan menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan penghargaan atas prestasi guru, serta menciptakan iklim kerja yang mendukung pengembangan profesionalisme guru.

### **5) Peningkatan Kesejahteraan Guru**

Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tuntutan tugas pokok yang berat akan lebih efektif dijalankan apabila guru mendapat imbalan yang sesuai, baik dalam bentuk gaji yang layak maupun

tunjangan yang memadai. Selain itu, adanya fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan program kesejahteraan lainnya dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja guru.

#### **6) Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran**

Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi dalam pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Oleh karena itu, guru perlu diberikan pelatihan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran jarak jauh atau blended learning. Kebijakan tugas pokok guru harus mencakup pelatihan dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari kewajiban untuk meningkatkan kompetensi profesional guru.

#### **7) Kolaborasi antara Guru, Sekolah, dan Orang Tua**

Dalam rangka mendukung tugas pokok guru, penting untuk membangun kolaborasi yang lebih baik antara guru, pihak sekolah, dan orang tua siswa. Kolaborasi ini dapat memperkuat komunikasi dan sinergi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembelajaran di kelas, tetapi juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik.

#### **8) Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan**

Agar kebijakan ini tetap relevan dan dapat diterapkan dengan baik, diperlukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan tugas pokok guru. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi guru harus melakukan monitoring dan evaluasi yang mendalam terhadap implementasi kebijakan ini, serta melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk guru itu sendiri.

Fokus pada Pengembangan Karier Guru Untuk menjaga kualitas pendidikan, pemerintah dan pihak terkait perlu merancang jalur pengembangan karier bagi guru yang jelas. Ini bisa mencakup jenjang karier yang lebih terstruktur, kesempatan untuk mengambil spesialisasi di bidang tertentu, atau peningkatan kualifikasi melalui pendidikan lanjutan. Dengan begitu, guru dapat melihat adanya prospek karier yang menarik, yang tidak hanya berfokus pada gaji, tetapi juga pada peningkatan kompetensi dan peran profesional mereka.

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan selesainya Artikel Penelitian ini, yang dilaksanakan Penelitian di Sekolah SPS Tunas Jaya Desa Surabaya, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada kepala sekolah, yakni Ibu Dwi Agustin, S.Pd beserta pihak yang terkait. Karena tanpa kerjasama dari pihak terkait, penelitian ini tidak bisa sempurna.

## DAFTAR REFERENSI

- Borg, W. R., & Gall, M. D. (2003). *Educational Research: An Introduction* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Hasan, S. (2017). *Membangun Kepemimpinan dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1999)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 103 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Peningkatan Kompetensi Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Nugroho, P. (2020). *Manajemen Kelas dalam Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini*. Surabaya: Pustaka Belajar.
- Pratama, I. M. (2016). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pendidikan dan Pelatihan: Studi Kasus di Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan*, 12(2), 1-14.
- Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006)
- Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005)
- Suyanto, B., & Muhaimin, M. (2011). *Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Edisi Kedua, 2005)